

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendidikan Nasional adalah proses awal menggali, mengasah dan mempersiapkan potensi anak-anak bangsa agar tercipta generasi yang tumbuh dan berkembang total, integratif dan optimal sehingga dapat berkompetisi di era globalisasi serta dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.<sup>1</sup>

Proses dan tujuan yang demikian besar dan kompleks tentu saja tidak dilaksanakan sepenuhnya tanpa adanya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tersebut merupakan sasaran Pendidikan Nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Selain itu peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah atau negara saja, namun juga memerlukan uluran tangan serta keterlibatan orang tua terdidik dan masyarakat luas, baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dimana salah satu ketentuannya berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam

---

<sup>1</sup> Direktorat SLTP, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: DEPDIKNAS, 2001), 1

penyelenggaraan dan mutu layanan pendidikan.”<sup>2</sup>

Hal ini juga diperkuat dengan adanya 3 alasan mengapa mutu pendidikan di Indonesia kurang berhasil, yaitu:

1. Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan *educational production function* dan *in put-out put*, dan analisisnya tidak dilaksanakan secara konsekuen.
2. Penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sentralistik telah membuat sekolah seringkali menerima kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut.
3. Peran serta warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.<sup>3</sup>

Poin ketiga dari alasan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan juga membutuhkan tanggung jawab warga sekolah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu: ”pendidikan harus diposisikan melalui sekolah, rumah dan masyarakat”, yang kemudian diamanatkan oleh MPR dalam Tri Fungsi Pendidikan (Tri Pusat Pendidikan). Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa perlunya disinergiskan hubungan antara orang tua, masyarakat dan madrasah agar tercipta tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, sekolah dan juga pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Tentang hal ini Hymes juga menekankan bahwa:”sekolah merupakan *suplement* dari masyarakat, oleh karena itu sangat perlu adanya hubungan sekolah dengan masyarakat.”<sup>4</sup>

Begitu pentingnya peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan seakan memaksa masyarakat yang selama ini pasif

---

<sup>2</sup> Ibid., 2

<sup>3</sup> Ibid., 2

<sup>4</sup> Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, *Administrasi Pendidikan*, (Malang: IKIP Malang, 1989), 226

terhadap pendidikan ditantang untuk lebih aktif dan partisipatif sebagai penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya sekadar menyumbangkan dana untuk pembangunan gedung ataupun membayar uang sekolah saja, tetapi lebih dari semua itu masyarakat diminta untuk lebih partisipatif dalam hal-hal kependidikan yang lain. Secara khusus, pemerintah mendukung adanya peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2000 serta SK Mendiknas NO 044/U/2002 pada tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yaitu: "Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi, penyelenggaraan pendidikan dan terciptanya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal, maka dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri."<sup>5</sup>

Madrasah merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya dan tidak dapat dipungkiri bahwa madrasah dulunya adalah lembaga pendidikan yang termarginalkan. Ketika kata "madrasah" disebut maka kesan dari kebanyakan orang adalah lembaga pendidikan tersebut sangat sederhana dan kurang bermutu. Data yang diungkap oleh Departemen Agama (2002) menunjukkan hanya sekitar 20% saja dari keseluruhan masyarakat Indonesia, yang tergambar dari APK

---

<sup>5</sup> Mendiknas, SK NO 044/0/U/2000 Tentang Dewan Pendidikan & Komite Madrasah, Jakarta: 2002

madrasah. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (2002) juga mengungkapkan bahwa masyarakat memandang madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan kelas dua, pilihan terakhir setelah tidak diterima di sekolah umum.<sup>6</sup>

Walaupun demikian setiap orang mengakui bahwa menyelesaikan pendidikan pada Madrasah tidak kalah dengan sekolah umum, adapula sebagian orang beranggapan bahwa sekolah Madrasah merupakan sekolah yang aman, karena di Madrasah terdapat banyak pelajaran agama. Karena itulah madrasah sebagai tingkat satuan pendidikan yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik secara sosial institusional maupun fungsional akademik. Oleh karena itu madrasah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bermutu agar menghasilkan pendidikan yang bermutu pula.<sup>7</sup>

Madrasah Aliyah Negeri Kediri 3 adalah sekolah MA Negeri yang bernafaskan Islam yang berada dibawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia yang merupakan satu dari tiga jenjang pendidikan MAN terpadu di Kediri.

Teori tentang mutu pendidikan menyebutkan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan selain diperlukan *input* yang bermutu, proses yang bermutu juga diperlukan jalinan hubungan yang sinergis antara keluarga, masyarakat dan sekolah agar menghasilkan keluaran (*output*) yang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), 20

<sup>7</sup> *Ibid.*, 23

mempunyai keunggulan akademik dan non-akademik serta hasil (*outcomes*) yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Perlunya hubungan yang baik antara keluarga, sekolah dan masyarakat ini didukung oleh pernyataan Mochtar Bukhori, yaitu: “Tinggi rendahnya mutu pendidikan di daerah dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.”<sup>8</sup>

Juga pernyataan dari Mochtar Bukhori:

Sekolah tidak dapat lagi kita pikirkan sebagai suatu lembaga sosial yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang lain. Sekolah harus kita pandang sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang ada di sekitarnya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat daerah atau masyarakat nasional. Kemudian pendidikan tidak dapat lagi kita bayangkan sebagai kegiatan yang hanya dilaksanakan di sekolah, yang bersifat terlepas dari kegiatan pembinaan anak yang terjadi dilingkungan keluarga serta kegiatan pengembangan diri yang dialami anak dalam lingkungan masyarakat.”<sup>9</sup>

MAN Kediri 3 dalam melanjutkan keberhasilannya selain memerlukan *input* serta proses yang bermutu juga memerlukan Komite Madrasah sebagai wadah yang telah dibentuk untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya statment 3 faktor yang mendukung kesuksesan pengembangan Madrasah Aliyah Negeri 3 ini salah satu faktornya adalah adanya dukungan dari orang tua murid serta lingkungan pendidikan sekitarnya melalui Komite Madrasah.<sup>10</sup> Dalam meningkatkan mutu pendidikan diperlukan peran Komite Madrasah yang terealisasi dengan

---

<sup>8</sup> Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), 9

<sup>9</sup> *Ibid.*, 10

<sup>10</sup> [www.main.man3kediri.sch.id](http://www.main.man3kediri.sch.id) diakses 15 Maret 2013 jam 19.30 WIB

baik dan perlunya strategi untuk mengoptimalkan peran tersebut agar menghasilkan peningkatan mutu pendidikan di MAN Kediri 3 ini.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis merasa tertarik dengan permasalahan ini untuk diteliti dengan mengambil judul: “Strategi Kepala Madrasah dalam Optimalisasi Peran Komite Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN Kediri 3.”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang diatas, maka kita dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Kota Kediri 3 ?
2. Apa Kontribusi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Kota Kediri 3 ?
3. Bagaimanakah Strategi Kepala Madrasah Aliyah Negri 3 Kediri untuk Mengoptimalkan Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Kota Kediri 3 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN Kota Kediri 3.
2. Untuk mengetahui kontribusi apa yang telah diberikan oleh Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Kota

Kediri3.

3. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh Kepala Madrasah, untuk Mengoptimalkan Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Kota Kediri 3.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat dijadikan sebagai tambahan khazanah ilmiah pengetahuan di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.
- b. Bagi penulis bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Strategi Optimalisasi Peran Komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN Kediri 3 khususnya dan semoga dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan tempat penulis akan mengabdikan ilmunya.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi pihak yang terkait, khususnya praktisi pendidikan, masyarakat maupun pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi pembaharuan dunia pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi.
- b. Bagi lembaga pendidikan MAN Kediri 3 dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan tentang optimalisasi kerja-kerja komite madrasah.